

**Penulis:**

Ferdy Hidayat,

Afiliasi:Universitas Kristen Duta
Wacana (UKDW)**LOKO KADA TUO:** Jurnal
Teologi Kontekstual &
Oikumenis

ISSN: xxxxxx-xxxxxx (cetak)

ISSN: xxxxxx-xxxxxx (online)

DOI : xxxxxxxxxxxxxx

Vol. 04 No. 01, 04, 2024;
(hlm 001-021)

BERTEOLOGI PUBLIK TERHADAP EKONOMI DAN EKOLOGI

Studi Kasus: Penolakan Rencana Tambang LTJ oleh Masyarakat Salutambun di Kabupaten Mamasa

Abstract

This article aims to answer questions regarding the public theological attitude created by the rejection of the LTJ mining plan and its vertical and horizontal patterns. By using public theology analysis tools from Emanuel Gerrit Singgih, this paper finds that overall the public theology built in the rejection of the LTJ mining plan by the Salutambun community has shown a critical attitude and is not anti-structure. This content is in line with the public theology formulated by Gerrith Singgih both vertically and horizontally. Vertically, it touches three theological domains, namely Theo-Logy/Spirituality showing the solidarity of the Salutambun community in rejecting the LTJ mining plan, showing spirituality that is not only confined to church buildings; Ecclesiology can be seen in the courage of the Salutambun people who show their identity as citizens of the kingdom of God who want to change structural and open injustice by collaborating with a number of elements of the student movement; Missiology is shown through the concrete practices of the Elim Salutambun Congregation Church, such as the church building which is occupied for holding meetings and the church council seeks accommodation for the community who will convey aspirations to reject the LTJ mining plan. Horizontally, the rejection of the LTJ mining plan by the Salutambun community shows the mapping of three axes of power, namely: the State Axis is the government, the Market Axis is PT. Monazite San, and the Axis of Community is Society. It was found that there was an imbalance in the three pillars of civil society, where the market and community tried to control each other. Markets tend to regulate states and communities, as do communities that wish to assert their dominance through negotiations with the state.

Keywords: elim salutambun congregation, ltj mining, public theology, mamasa

Abstrak

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan mengenai sikap teologi publik yang tercipta dalam penolakan rencana tambang LTJ dan polanya secara vertical dan horizontal. Dengan menggunakan alat analisis teologi publik dari Emanuel Gerrit Singgih, tulisan ini menemukan

bahwa secara keseluruhan teologi publik yang dibangun dalam penolakan rencana tambang LTJ oleh masyarakat Salutambun telah memperlihatkan sikap kritis dan tidak anti struktur. Muatan ini selaras dengan teologi publik yang dirumuskan oleh Gerrith Singgih baik secara vertikal maupun secara horisontal. Secara vertikal, yang menyentuh tiga ranah teologi, yakni *Theo-Logy/Spirituality* memperlihatkan solidaritas masyarakat Salutambun menolak rencana tambang LTJ, menampilkan spiritualitas yang tak hanya terkurung dalam gedung gereja; *Eklesiologi* terlihat pada keberanian masyarakat Salutambun yang menampakkan identitasnya sebagai warga kerajaan Allah yang hendak mengubah ketidakadilan struktural dan terbuka dengan melakukan kerjasama dengan sejumlah elemen gerakan mahasiswa; *Misiologi* dinampakkan melalui praktik kongkrit Gereja Jemaat Elim Salutambun seperti gedung gereja yang ditempati untuk melakukan rapat dan majelis gereja mengupayakan akomodasi bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi penolakan rencana tambang LTJ. Secara horisontal, penolakan rencana tambang LTJ oleh masyarakat Salutambun, menunjukkan pemetaan tiga poros kekuasaan, yakni: Poros Negara adalah pemerintah, Poros Pasar adalah PT. Monazite San, dan Poros Komunitas adalah Masyarakat. Ditemukan bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam tiga pilar *civil society*, dimana pasar dan komunitas berusaha menguasai satu sama lain. Pasar cenderung mengatur negara dan komunitas, begitu pula dengan komunitas yang ingin menonjolkan dominasinya melalui negosiasi dengan negara.

Kata Kunci: jemaat elim salutambun, tambang ltj, teologi publik, mamasa

Latar Belakang Permasalahan

Emanuel Gerrit Singgih dalam bukunya yang berjudul “*Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik*” memberikan beberapa contoh tentang ideologi kepemilikan dan pengelolaan tanah, termasuk di dalamnya adalah ideologi kerumah-tanggaan. Singgih menyebutkan bahwa ideologi ini dapat dilihat pada gereja-gereja suku, dimana tanah nenek moyang menjadi bagian dari kehidupan bergereja, dan tidak ada kehidupan gereja yang tidak berkaitan dengan warisan nenek moyang, termasuk yang berkaitan dengan adat-istiadat. Tidak jarang nenek moyang sudah illahi atau hampir illahi, maka disitu ideologi teokrasilah yang berlaku.¹ Penulis melihat, bahwa ideologi kerumah-tanggaan yang digambarkan di atas termanifestasikan dan selaras dengan dinamika yang dilalui oleh sebagian warga Gereja Toraja Mamasa (GTM) di Desa Salutambun, Kecamatan Buntu Malangka’, Kabupaten Mamasa pada bulan Agustus-November tahun 2020 yang lalu. Mereka berjuang melindungi tanah leluhurnya dari rencana penambangan dengan melibatkan identitas agamanya dan nilai-nilai leluhur yang di yakini.

Di penghujung tahun 2020, masyarakat Mamasa dikejutkan dengan terpasangnya papan pengumuman tentang sosialisasi rencana penambangan Logam Tanah Jarang (LTJ) atau *Rare Earth*, di tiga kecamatan yakni Kecamatan Aralle, Kecamatan Mambi, dan Kecamatan Buntu Malangka’. Pengumuman ini di prakarsai oleh PT. Monazite San, ditandatangani oleh Komisi Amdal DLHK Kabupaten Mamasa, serta diketahui oleh lima Kepala Desa dari Kecamatan Aralle.² Apa yang membuat rencana penambangan LTJ ini mengundang polemik disebabkan karena hanya lima Kepala Desa dari Kecamatan Aralle yang mengetahui rencana tersebut, dimana masyarakat Kecamatan Buntu Malangka’ dan juga sebagian masyarakat Kecamatan Aralle tidak dilibatkan. Padahal nama Kecamatan mereka ada dalam rencana penambangan LTJ tersebut. Masyarakat yang tidak dilibatkan ini sebagian besar berasal dari Kecamatan Buntu Malangka’ yakni Desa Salutambun Barat, Desa Salutambun, Desa Salutambun Timur, dan Desa Aralle Timur; sedangkan Kecamatan Aralle datang dari masyarakat

¹ Emanuel Gerrit Singgih, *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik: Sebuah Kumpulan Tulisan Teologi Kontekstual Emanuel Gerrit Singgih* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 55.

² ‘Rencana Penambangan LTJ Di Mamasa Mulai Tuai Penolakan - Halaman 2 - Tribun-Timur.Com’, accessed 1 December 2023, https://makassar.tribunnews.com/2020/08/16/rencana-penambangan-ltj-di-mamasa-mulai-tuai-penolakan?page=2#google_vignette.

tiga lingkungan di Kelurahan Aralle (Lingkungan Leune, Tananam, dan Bulo) dan satu dusun dari Desa Aralle Utara (Dusun Poding).

Menurut Arwias (pemuda Desa Salutambun Timur), 4 Desa, 3 Lingkungan, dan 1 Dusun yang menolak rencana tambang LTJ ini, selain karena merasa tidak dilibatkan dalam rencana penambangan LTJ, secara kultur masyarakatnya memang identik dengan kepedulian yang tinggi pada nilai-nilai budaya dan ekologi. Arwias menyebutkan bahwa ikatan masyarakat dengan alam adalah ikatan yang tidak bisa diputuskan, apalagi jika dikorbankan menjadi tambang. Arwias menegaskan bahwa ikatan ini merupakan petuah leluhur yang terus mereka pegang sampai hari ini.³ Senada dengan Arwias, juru bicara masyarakat yang menolak rencana tambang LTJ, Paulus Jelatu mengatakan bahwa wilayah rencana tambang adalah tanah adat yang tidak boleh diganggu gugat, karena memiliki nilai sejarah, budaya, dan masyarakatnya telah mendiami wilayah tersebut dengan aman dan tentram.

Wilayah kami bermata pencaharian padi, kakao, kopi, dan tanaman produktif lainnya. Ini tidak sebanding dengan berapapun nilai uang yang ditawarkan oleh pihak penambang. Ditambah lagi dengan nilai budaya yang telah diwariskan turun temurun oleh nenek moyang. Kami tidak rela tanah leluhur kami diabrak-abrik oleh penambang karena disinilah kami hidup mati kami.⁴

Gambar 1 Papan Pengumuman Rencana Tambang Logam Tanah Jarang di Depan Kantor Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa



Sumber: *Tribun Timur*

Berfokus pada masyarakat di tiga desa (Desa Salutambun, Desa Salutambun Barat, dan Desa Salutambun Timur), yang selain karena tidak terlibat dan upaya

³ Wawancara dengan Arwias Pemuda Desa Salutambun, via Whatsapp, 27 November 2023.

⁴ 'Ditayangkan Warta Kominfosandi Mamasa - Postingan | Facebook', accessed 2 December 2023, <https://www.facebook.com/108568330731387/posts/pfbid0bgFyys6NRMBFBMrkgJNDKJ5fsdpGaa7mUi3sfz03Yfe55Fs3Cz2UVsRBUBGF8qzBl/?app=fbl>.

mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan leluhur, polemik rencana tambang LTJ juga ditolak karena jarak antara titik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan pemukiman masyarakat sangat berdekatan. Alasan ini dilandaskan pada Laporan Survey Tinjauan Lokasi yang dikeluarkan oleh PT. Monazite San, dimana 4 blok utama dari 30 titik rencana tambang LTJ, berdekatan dengan sawah, kebun, pemukiman masyarakat, hingga rumah ibadah (Gereja).⁵ Jarak yang berdekatan ini, kemudian dinilai oleh masyarakat yang secara mayoritas beragama Kristen di wilayah Salutambun akan menjadi ancaman bagi anak cucu di masa depan jika tambang LTJ dapat terealisasi. Hingga akhirnya rencana tambang LTJ di Mamasa mendapat respon dari berbagai elemen sosial seperti; gerakan mahasiswa, LSM, beberapa anggota DPRD Mamasa, hingga lembaga keagamaan yakni Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ Elim Salutambun). Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Gani (pemuda Gereja Jemaat Elim Salutambun), bahwa penolakan rencana tambang LTJ juga datang dari Gerejaya, dimana Gani dan yang lainnya di doakan di Gereja sebelum berangkat menyampaikan aspirasi ke pemangku kebijakan. Gani menambahkan bahwa BPMJ Elim Salutambun juga menjalankan persembahan khusus untuk akomodasi, transportasi, dan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan.⁶

Anggota jemaat Elim Salutambun adalah masyarakat etnis Bambang yang merupakan sub suku Toraja dan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani. Masyarakatnya menurut Andri Saputra adalah migran dari Kebanga (Kampung tua yang juga Desa di Kecamatan Buntu Malangka'), dimana mereka bermigrasi untuk penanggulangan kemiskinan di pemukiman sebelumnya. *Indo Kada Nene* (pemimpin adat di Kecamatan Aralle) memberikan tanah kepada masyarakat Salutambun sebagai *mana'* (pemberian cuma-cuma) untuk digarap dan menjadi pemukiman penduduk.⁷ Jumlah anggota jemaat di Gereja Jemaat Elim Salutambun adalah 673 jiwa, dengan 7 daerah pelayanan yang secara administrasi kependudukan tersebar di tiga Desa, dimana 3 daerah pelayanan berada di Desa Salutambun, 2 daerah pelayanan di Desa Salutambun Timur, dan 2 daerah pelayanan lainnya di Desa

⁵ Arie O, 'Laporan Survey Tinjau Lokasi Mika Derah Kecamatan Mambi Bumal Dan Aralle, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat' (Jakarta: PT. Monazite San, 2015), 9.

⁶ Wawancara dengan Gani, Pemuda Desa Salutambun, via Whatsapp, 26 November 2023.

⁷ Jefri Andri Saputra, 'Analisis Makna Simbol Batu Tallu Dan Täbä Tallu Tentang Pemeliharaan Allah Di Salutambun Dengan Menggunakan Teori Ernst Cassirer', *KAMASEAN: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 1, no. 1 (2020): 63.

Salutambun Barat.⁸ Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan di Desa Salutambun 294 jiwa, Desa Salutambun Barat 540 jiwa, dan Desa Salutambun Timur 380 jiwa, sehingga terdapat 4 rumah ibadah lain di tiga desa tersebut, yakni; GTM Jemaat Musafir Kadolang (Salutambun Barat), GTM Jemaat Gloria Balo-Balo, GPDI Salutambun Timur dan GBI Balo-Balo (Salutambun Timur).⁹

Rumusan Masalah dan Metode Analisis

Uraian di atas memperlihatkan konfrontasi antara komunitas agama dengan kebijakan publik. Premis ini dilihat dalam sikap masyarakat Salutambun yang melandaskan kehidupannya pada nilai-nilai kekristenan dan tradisi leluhur untuk menjaga alam, dimana rencana tambang LTJ bertentangan dengan prinsip spiritual dan nilai-nilai leluhur yang mereka hidupi. Di dalam prinsip dan nilai tersebut terdapat peran Gereja melalui BPMJ Elim Salutambun yang menolak rencana tambang LTJ. Dalam perannya tersebut, analisis untuk menemukan pola-pola yang dibangun untuk berhubungan dengan publik perlu dilakukan. Dengan pertanyaan, *sikap teologi publik apa yang tercipta dalam penolakan rencana tambang LTJ?* dan *pola teologi publik vertical dan horizontal apa yang tercipta dalam penolakan rencana tambang LTJ?* maka tulisan ini diharapkan dapat memunculkan pandangan teologi yang holistik dan berimbang dalam menghadapi permasalahan kompleks di persimpangan antara hubungan dengan publik dan nilai-nilai keberpihakan pada agama dan budaya.

Adapun alat analisis yang akan digunakan dalam kajian ini adalah teologi publik dari Emanuel Gerrit Singgih. Data akan diperoleh dari tinjauan pustaka (media online dan media sosial) serta wawancara mendalam kepada masyarakat di Salutambun. Temuan-temuan yang didapatkan akan diuraikan dalam bagian pembahasan, setelah itu akan penulis dialogkan dengan alat analisis pada bagian berikutnya, dan diakhiri dengan sebuah penutup yang memberikan refleksi teologis dan kesimpulan.

Pembahasan

⁸ Wawancara dengan Ebenheiser, Majelis Gereja Jemaat Elim Salutambun, 2 January 2024.

⁹ Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Mamasa, 'Kecamatan Buntu Malangka' Dalam Angka 2023'.

A. Tanah Jarang dan Sisi Ekonomisnya di Mamasa

Dilansir dari Kompas, *rare earth* atau tanah jarang adalah logam yang langka dan hanya segelintir negara di dunia yang memilikinya. Logam ini merupakan mineral yang bersifat magnetik dan konduktif, banyak digunakan di perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, speaker, dan lain-lain. Selain itu, logam tanah jarang juga dimanfaatkan untuk sektor lainnya, mulai dari bidang kesehatan, otomotif, penerbangan, hingga industri pertahanan. Banyak senjata militer canggih diproduksi dengan komponen yang harus dibuat dengan rare earth. Tanpa suplai logam tanah jarang, maka produsen ponsel bisa berhenti beroperasi.¹⁰ Seperti kebanyakan kasus penolakan tambang di Indonesia, rencana tambang LTJ di Mamasa juga menjadi isu yang membuat masyarakat terpolarisasi karena sikap pro dan kontra. Rencana tambang LTJ rupanya mendapat dukungan dari sebagian masyarakat Muslim di Kecamatan Aralle dan Mambi. Menurut Mahenrata (ketua BPMJ Elim Salutambun), yang ditakutkan dari pro-kontra tambang LTJ ini adalah terulangnya konflik sosial di masa lalu, saat pemekaran Kabupaten Mamasa.¹¹

Ketiga Kecamatan yang masuk dalam titik koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP), pernah mengalami konflik sosial, yaitu konflik ATM (Aralle, Tabulahan, Mambi). Dan pola perselisihan antara pro-kontra pemekaran Mamasa dan pro-kontra rencana tambang LTJ memiliki kemiripan; yaitu antara masyarakat Muslim yang beretnis Mandar dan Kristen yang beretnis Toraja¹²

Dampak dari pro kontra di dalamnya masing-masing pihak merasa benar adalah perdebatan di media sosial (*Facebook*) yang tak terhindarkan. Dukungan terhadap hadirnya tambang LTJ di Mamasa ini, ditengarai oleh dampak ekonomi, yang

¹⁰ Kompas Cyber Media, 'Mengenal Logam Tanah Jarang atau Rare Earth yang Bikin Geger se-Eropa Halaman all', KOMPAS.com, 14 January 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/01/14/112117826/mengenal-logam-tanah-jarang-atau-rare-earth-yang-bikin-geger-se-eropa>.

¹¹ Konflik ATM (Aralle, Tabulahan, Mambi) adalah konflik yang pecah karena pro-kontra Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Mamasa, dari Kabupaten Polewali Mamasa (Kabupaten Polewali Mandar saat ini). Lihat: Tabah Maryanah, 'Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013), 15; Mohamad Subhan, 'Rivalry of the Elites in Ethno-Religious Conflicts: Dynamics of Conflict Arising from Territorial Split of Mamasa', *International Journal of Business and Social Science* 9, no. 11 (2018), 21; Sofian Munawar Asgart, 'Monograf Kabupaten Mamasa, Narrative Report', narrative report (Hivos-Yayasan Interseksi, 2015), 64-66.

¹² Wawancara dengan Mahenrata Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Elim Salutambun, via Whatsapp, Desember 2023.

dianggap akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Kabupaten Mamasa jika rencana tambang terealisasi. Wacana-wacana seperti terbukanya lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi karena dampak *Coronavirus Disease* (Covid-19) menjadi argumen pendukung dari pihak-pihak yang mendukung rencana tambang LTJ tersebut. Kehadiran lapangan kerja bagi masyarakat Mamasa memang menjadi kebutuhan terbesar, mengingat banyak dari warga di Kabupaten Mamasa banyak yang merantau keluar daerah untuk mencari pekerjaan. Selain itu, infrastruktur jalan di Kabupaten Mamasa yang masih belum memadai, membuat momentum kehadiran tambang LTJ akan sangat memberi keuntungan bagi masyarakat Mamasa. Diasumsikan bahwa, lancarnya aktivitas dan operasional tambang LTJ nantinya akan sangat bergantung pada kondisi jalan. Sehingga PT. Monazite San, dengan sendirinya akan memperbaiki infrastruktur jalan di Mamasa.

B. Kronologi Penolakan Masyarakat Salutambun pada Rencana Tambang LTJ

Berdasarkan dokumen Laporan Survey Tinjauan Lokasi yang diterbitkan oleh PT. Monazite San untuk rencana tambang LTJ di Mamasa, disebutkan bahwa terdapat 30 titik koordinat daerah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dieksplorasi oleh PT. Monazite San.¹³ Dokumen yang disusun berdasarkan hasil eksplorasi dari tanggal 12 Juni-01 Juli 2015 ini, berisi hasil eksplorasi dengan gambaran peta geologi dan topografi, serta keadaan sosial masyarakat setempat. Diberitakan oleh Tribun Timur pada 16 Agustus 2020, masyarakat di Kecamatan Buntu Malangka' dan sebagian Kecamatan Aralle dikejutkan oleh berdirinya papan pengumuman terkait rencana tambang LTJ di depan Kantor Camat Aralle. Dalam papan pengumuman yang dipasang oleh PT Monazite San untuk sosialisasi dalam tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), luas area yang akan ditambang sekitar 9.390,8 hektare.¹⁴

Gambar 2 IUP Rencana Tambang LTJ dan Penolakan Masyarakat Salutambun

¹³ O, 'Laporan Survey Tinjau Lokasi Mika Daerah Kecamatan Mambi Bumal Dan Aralle, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat', 6.

¹⁴ 'Rencana Penambangan LTJ Di Mamasa Mulai Tuai Penolakan - Halaman 1 - Tribun-Timur.Com'.



Untuk mencegah keresahan masyarakat, pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2020 masyarakat Salutambun dan Aliansi Mahasiswa yang menolak, melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Mamasa dan Kantor Bupati Mamasa. Dalam berita acara yang disepakati antara Pemkab Mamasa, DPRD Mamasa, dan masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap rencana tambang LTJ; disebutkan bahwa rencana ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, tidak sesuai adat istiadat kebiasaan masyarakat dan mengancam serta merusak peradaban. Selain itu, Pemkab bersama DPRD Mamasa merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk tidak mengeluarkan izin lingkungan jika permasalahan tersebut belum tuntas, serta memerintahkan Camat Aralle, Mambi, dan Buntu Malangka' untuk mencabut papan pengumuman PT Monazite San yang mencantumkan DLHK Kabupaten Mamasa dan pemerintah desa, termasuk Lurah Aralle, Kepala Desa Aralle Utara, Kepala Desa Panetean, Kepala Desa Aralle Selatan, dan Kepala Desa Uhailanu.¹⁵

Tak berhenti sampai disitu, sekalipun memiliki surat berita acara kesepakatan bersama antara DPRD, Bupati, dan masyarakat yang menolak, yang di dalamnya belum mengandung ketidakpastian. Maka masyarakat yang diwakili oleh aliansi mahasiswa bersepakat untuk tetap mengawal hingga ke pemerintah Provinsi karena yang punya wewenang mengeluarkan izin adalah Dinas Pertambangan Provinsi. Hal ini direalisasikan pada 21 September 2020 aliansi mahasiswa menyambangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Sulbar untuk menyampaikan sikap penolakannya. Dalam pertemuan tersebut, M. Rahmad Sanusi selaku kepala Dinas PMPTSP Sulbar mengatakan bahwa izin eksplorasi yang dimiliki PT. Monazite San untuk pengelolaan tambang LTJ di Kabupaten Mamasa sudah mati

¹⁵ 'Respons Aspirasi Pemuda, Bupati Mamasa Sepakat Tolak Tambang Logam Tanah Jarang | Kumparan.Com', accessed 1 December 2023, <https://kumparan.com/sulbarkini/respons-aspirasi-pemuda-bupati-mamasa-sepakat-tolak-tambang-logam-tanah-jarang-1u58UDEfmse>.

pada tahun 2017 dan belum diberikan izin lagi. Selain itu, PT. Monazite San juga belum memiliki Izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan syarat utama dalam penerbitan izin produksi.¹⁶ Hasil rapat dengar pendapat ini kemudian kembali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Mamasa pada tanggal 24 September 2020. Aksi unjuk rasa penolakan tambang LTJ yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional kembali disampaikan puluhan pemuda dan mahasiswa, yang tergabung dalam aliansi pemuda dan mahasiswa kabupaten Mamasa, dimana aksi ini kembali dilakukan kantor Bupati Mamasa. Isu yang dibawa oleh mereka adalah rencana tambang yang cacat prosedural lantaran izin eksplorasi yang dimiliki pihak perusahaan dianggap sudah kadaluarsa serta dianggap akan memberi dampak kerugian bagi masyarakat; yaitu dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan dampak kesehatan.¹⁷

Perjuangan penolakan rencana tambang LTJ di akhiri pada 28 Oktober 2020, hal tersebut dilakukan untuk mempertegas penolakan rencana tambang LTJ di Mamasa. Masyarakat menyambangi Kantor DPRD Sulbar dengan agenda audiens dan rapat dengar pendapat dengan anggota komisi III DPRD Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK Sulbar), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM Sulbar), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP Sulbar). Adapun masyarakat terdampak yang ikut, diwakili oleh lima kepala Desa dari Kecamatan Buntu Malangka', tiga Kepala Lingkungan dari Kelurahan Aralle, dan satu Kepala Dusun dari desa Aralle Utara.¹⁸

C. Kegelisahan dan Peran Gereja Jemaat Elim Salutambun

Menurut Arifin (pendeta Jemaat Elim Salutambun periode 2016-2021), masyarakat di Salutambun dilanda kepanikan dan kegelisahan yang cukup lama, saat isu rencana tambang LTJ mengemuka ke publik. Hal ini bermula dari adanya papan pengumuman di Kantor Kecamatan Aralle, yang memasukkan Salutambun sebagai salah satu titik kordinat utama dari IUP, namun tanpa pemberitahuan ke masyarakat

¹⁶ 'Tegas Tolak Tambang Masuk P.U.S, Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mamasa Sambangi DPMPSTP Sulbar', *Pena Sulbar* (blog), 22 September 2020, <https://penasulbar.co.id/tegas-tolak-tambang-masuk-p-u-s-aliansi-mahasiswa-kabupaten-mamasa-sambangi-dpmpstp-sulbar/>.

¹⁷ 'Lagi, Pemuda dan Mahasiswa di Mamasa Demo Tolak Tambang LTJ', *Tribun-timur.com*, accessed 1 December 2023, <https://makassar.tribunnews.com/2020/09/24/lagi-pemuda-dan-mahasiswa-di-mamasa-demo-tolak-tambang-ltj>.

¹⁸ 'Tadi Siang Di Kantor DPRD Provinsi Sulbar... - Riskul Nursan Tona | Facebook', accessed 1 December 2023, <https://www.facebook.com/100010836673751/posts/pfbid021cs8uYueoTnrzwizkAihjt58YM9uP18CLaFMs2rwYNjJjMWUQ4gXDFXBFThawZS8l/?app=fbl>.

Salutambun sebelumnya. Arifin menambahkan, bahwa selaku unsur pemimpin Agama di Salutambun, ia juga dengan tegas menolak rencana tambang LTJ, karena masyarakat akan tersingkir jika rencana ini terealisasi. Sebagai contoh pada aspek keagamaan, jemaat akan kehilangan bangunan rumah ibadah (Gereja) yang sangat dekat dengan salah satu titik koordinat IUP. Arifin menceritakan bahwa kondisi saat itu cukup memberi tantangan iman bagi warga jemaat di Salutambun:

Tantangan iman yang kami rasakan mulai dari kegelisahan karena tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pendirian tambang; khawatir akan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang diperlukan untuk hidup, seperti air bersih dan lahan pertanian; ketidakpastian ekonomi; serta ketakutan pada terciptanya konflik antara kami dengan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat yang pro tambang.¹⁹

Senada dengan Arifin, ketua BPMJ Jemaat Elim Salutambun, Mahenrata mengatakan bahwa isu utama yang menjadi bahan refleksi bagi kami majelis gereja adalah ketersingkiran warga jemaat dari pemukimannya di Salutambun serta dampak tambang pada bangunan Gereja. Belajar dari daerah-daerah tambang di Indonesia; seperti beberapa daerah di Kalimantan dan Morowali, ketika tambang masuk, pemukiman masyarakat sekitar akan di korbakan.

Mahenrata menyebut bahwa *masyarakat Salutambun* yang sekaligus *jemaat Gereja* adalah peran utama Gereja dalam gerakan penolakan tersebut, selebihnya adalah tokoh-tokoh dari kalangan majelis gereja yang juga menjadi garda terdepan menolak tambang. Mahenrata menambahkan, bahwa beberapa kali gedung gereja ditempati untuk melakukan rapat. Mahenrata menyebut bahwa faktor yang membuat penolakan rencana tambang LTJ di Salutambun berhasil adalah kekompakan masyarakat. Kekompakan ini yang dikomandoi oleh tiga unsur kepemimpinan yaitu: kepemimpinan adat yang dipimpin *Tomatua* (Sesepuh di Salutambun), kepemimpinan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa, dan kepemimpinan gereja yang dipimpin oleh BPMJ. Selain itu, masih berpihaknya pemerintah Kabupaten Mamasa dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada masyarakat Salutambun adalah faktor pendukung lainnya.

¹⁹ Wawancara dengan Pdt. Arifin, S.Th Pendeta di Jemaat Elim Salutambun (periode 2016-2021), via Whatsapp, Desember 2023.

Penulis mencoba memahami bagaimana faktor keberhasilan penolakan rencana tambang LTJ dengan meminta informasi kepada salah satu pemuda dari Salutambun timur, yaitu Arwias. Menurutnya masyarakat Salutambun adalah masyarakat yang sangat patuh terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh Gereja, “apapun instruksinya”. Sehingga karena beberapa titik koordinat IUP berdekatan dengan bangunan Gereja; maka masyarakat Salutambun kompak menolak rencana tambang tersebut. Arwias menambahkan bahwa masyarakat Salutambun juga masih mempertahankan kebiasaan leluhur, yang selalu meminta izin sebelum memanfaatkan alam. Menurut Arwias, meminta izin sebelum mengeksplorasi tidak dilakukan oleh PT. Monazite San.²⁰

Senada dengan Arwias, Andri Saputra menyebut bahwa masyarakat Salutambun masih tetap menghargai tradisi leluhur yang berhubungan dengan alam. Ia menjelaskan dua konsep petuah dari para leluhur yakni *Sakkena Lita'* (aturan yang mengatur hubungan dengan alam) dan *Sakkena Hupatau* (aturan mengenai hubungan dengan sesama). Berfokus pada *Sakkena Lita'* yang dipahami sebagai perintah agar masyarakat Salutambun tetap memelihara aturan dalam *pa'totibojongam* (aturan adat yang berhubungan dengan memanfaatkan sumber daya alam) sebagai dasar dalam melaksanakan setiap pekerjaan, menghargai tanah Salutambun, tidak bersikap serakah pada alam, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak bekerja keras.²¹

Analisis Data

A. Apa itu Teologi Publik

Emanuel Gerrit Singgih menegaskan bahwa teologi publik merupakan sebuah wacana yang relatif agak baru, sehingga terdapat bermacam-macam pemahaman mengenai teologi publik. Contohnya seperti Banawiratma, ia menegaskan bahwa teologi publik berkiprah dalam masalah-masalah ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah umum diketahui (publik=umum), dan perspektifnya adalah pembebasan yang holistik. Berbeda dengan Banawiratma, Yahya Wijaya menyebut bahwa teologi publik cenderung mengambil sikap serealistik mungkin dan menghindari posisi yang terlalu utopian. Ia mengutip Duncan Forester, yang mengatakan [Teologi publik] berusaha untuk menggunakan teologi dalam debat publik,

²⁰ Arwias S, Liba', Wawancara dengan Arwias Pemuda Desa Salutambun, via Whatsapp, 27 November 2023.

²¹ Wawancara dengan Jefri Andri Saputra, Mahasiswa Teologi IAKN Toraja yang berasal dari Salutambun Timur, via Whatsapp, Desember 2023.

bukan idealisme abstrak dan optimis yang cenderung hancur ketika berhadapan dengan kejahatan radikal. Sehingga Wijaya melihat bahwa teologi publik cenderung bersifat negosiatif ketimbang konfrontatif. Kedua pendekatan yang berbeda mazhab di atas, dengan Banawiratma yang menggunakan pendekatan Marxian (pendekatan kiri) sedangkan Wijaya menggunakan pendekatan Weberian (pendekatan kanan), membuat Singgih mengamati bahwa debat Marx-Weber adalah debat yang sirkular, seperti perdebatan mana yang lebih dulu, *telor* atau *ayam*. Dan dalam konteks penyebab ketidakadilan, perdebatan mengenai *struktur* dan *budaya* menjadi dua aspek yang selalu mempertemukan kaum Marxian dan Weberian. Singgih melihat bahwa keduanya tidak mencukupi akibat memutlakkan pendekatannya, yang berujung pada nuansa ideologis. Padahal ideologi biasanya mengekang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu teologi, secara khusus dalam upaya berteologi publik. Oleh sebab itu, Singgih dengan menggunakan pendekatan Pierre Bourdieu (pendekatan pasca kiri dan kanan) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough mengenai analisis diskursif kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), melihat bahwa kedua pendekatan di atas perlu dilampaui. Singgih dalam catatannya menyebut bahwa CDA menyoroti kecenderungan ideologi-ideologi untuk menggeneralisasikan sehingga menjadi esensialistik (yang ini benar, itu salah, ini baik, itu jahat). Kenyataannya seringkali ambigu, sehingga yang menjadi ukuran sebaiknya bukanlah apa yang dinyatakan terjadi, tetapi apa yang terjadi! Menurut Singgih pendekatan Weberian melihat motif di balik tindakan dan teori/pandangan di balik tindakan/praktek/kenyataan/aksi. Sedangkan Marxian sebaliknya, bertolak dari tindakan/praktek/kenyataan/aksi yang kemudian dibuatkan teori/motif/pandangan/refleksi. Teologi publik ala Singgih yang melampaui pendekatan Marxian ala Banawiratma dan Weberian ala Wijaya di atas, mengusulkan agar tidak memperdebatkan mana yang duluan. Ia melihat bahwa seharusnya kita berfikir mengikuti lingkaran hermeneutis dengan melakukan keduanya; entah dimulai dari aksi atau refleksi, yang pasti keduanya harus dilakukan. Berfikir mengikuti lingkaran hermeneutis berbeda dengan pola berfikir sirkular (mana yang duluan), karena akan menjadi salah, jikalau hanya starting-point saja yang dijadikan ukuran.²²

Singgih memberi pemahaman mendasar akan bagaimana membangun sebuah teologi publik dalam rangka menghadapi tantangan konteks Indonesia masa ki-

²² Emanuel Gerrit Singgih, 'Membangun Teologi Publik Mengenai Topik "Profitability, Solidarity, Sustainability" Di Bawah Payung Ketidakadilan, Akan Terbit Dalam Antologi EGS, Dari Reformasi Ke Pasca Reformasi.' (Yogyakarta, 2024).

ni.²³ Dalam tulisannya, ia membahas teologi publik dengan berpedoman pada bahan refleksinya saat ia mengikuti pertemuan para pendeta, penatua, dan diaken Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dan disusun untuk kepentingan gereja GPIB. Namun penulis melihat bahwa, syarat-syarat pembangunan teologi publiknya selaras dengan cara masyarakat Salutambun menyatakan sikap penolakannya pada rencana tambang LTJ. Singgih berpendapat, bahwa teologi publik yang dibatasi dalam konteks Indonesia adalah teologi yang menanggapi isu-isu publik yang terdapat dalam kelima konteks penting, yakni: 1) pluralisme budaya dan agama, 2) kemiskinan yang parah, 3) penderitaan dan bencana, 4) ketidakadilan termasuk ketidakadilan gender, dan 5) kerusakan ekologi.²⁴

Setelah memahami konteks, Singgih berpendapat bahwa diperlukan adanya pemahaman mengenai identitas. Dalam hal ini menurut Singgih, identitas yang baik dalam konteks-konteks tersebut adalah identitas yang kuat di satu sisi, tetapi disisi lain menjadi identitas yang terbuka. Dalam keterbukaan identitas ini, seseorang dapat melihat identitas gerejanya (vertikal) dan identitasnya sebagai orang Indonesia (horizontal).²⁵ Singgih kemudian memberikan pengertian teologi publik yang dapat dipahami sebagai teologi yang memungkinkan sikap kritis, tetapi di pihak lain tidak harus mengambil posisi anti struktur seperti yang diperlihatkan dalam teologi pembebasan. Rumusan teolog publik ini selaras dengan analisisnya untuk melampaui pendekatan sirkular (Marx-Weber), dimana teologi publik di satu sisi bersikap kritis, namun di sisi lain tetap memperlihatkan sikap terbuka dengan pandangan pemikiran yang lain. Secara konkret, Singgih mengusulkan muatan teologi publik secara vertikal, yang dapat dilaksanakan pada aspek Spiritual, Eklesiologi, dan Misiologi.²⁶ Sedangkan secara horisontal muatan teologi publik mengupayakan agar tercipta keseimbangan dalam poros-poros kekuasaan (*civil society*).

Berkaca pada uraian pembahasan, dapat disebut bahwa masyarakat Salutambun menolak tambang LTJ karena: 1) konteks penderitaan dan bencana, masyarakat Salutambun mempertimbangkan penolakannya karena ancaman bencana dan penderitaan masyarakat jika tambang dapat terealisasi. Konteks ini menjadi tema

²³ Singgih, *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik: Sebuah Kumpulan Tulisan Teologi Kontekstual Emanuel Gerrit Singgih*, 364.

²⁴ Singgih, 365–73.

²⁵ Singgih, 373–77.

²⁶ Singgih, 379.

yang paling disadari oleh masyarakat Salutambun, dimana tersingkir dari pemukiman yang selama ini ditempati, menjadi ketakutan mereka; 2) ketidakadilan struktural, partisipasi masyarakat Salutambun yang sama sekali tidak nampak dalam rencana tambang LTJ menjadi konteks struktural yang disadari oleh mereka; 3) konteks kerusakan ekologis, masyarakat Salutambun menaruh perhatian besar pada ancaman terhadap lahan-lahan ekonomis (sawah dan kebun) yang selama ini di garap dengan cara tradisional.

Rencana tambang yang titik koordinat IUP-nya berdekatan dengan lahan-lahan masyarakat menjadi ketakutan yang dirasakan. Dengan demikian penolakan rencana tambang LTJ oleh masyarakat Salutambun, yang melibatkan peran gereja di dalamnya sejalan dengan teologi publik dari Singgih. Hal ini dapat dilihat pada penolakan rencana tambang LTJ dengan sikap yang kritis namun tidak anti terhadap struktur. Sikap kritis ini ditampakkan melalui negosiasi yang terus menerus dilakukan (hingga empat kali) kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Sikap tidak anti struktur nampak melalui masih adanya kepercayaan masyarakat Salutambun terhadap pemerintah setempat untuk melakukan negosiasi. Dalam negosiasi ini, masyarakat Salutambun meyakini bahwa pemerintah akan memihak masyarakat. Harapan ini juga menyukkseskan berbagai tahap negosiasi, karena pemerintah setempatnya rupanya berada di pihak masyarakat.

B. Teologi Publik secara Vertikal (Spiritual, Misiologi, dan Eklesiologi)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa berteologi publik yang dilakukan secara vertikal menyentuh tiga ranah teologi, yakni Spiritual, Eklesiologi, dan Misiologi. Pertama, *Theo-Logy/Spirituality*. Merujuk pada gambaran atau idea tentang Tuhan yang relevan dan kontekstual, Singgih membangun paradigma spiritual mengenai Tuhan seperti apa dan bagaimana Ia menjawab tantangan-tantangan konteks yang ada di Indonesia. Apa yang penting digaris bawahi dalam bagian ini adalah anjuran Singgih agar waspada dengan teologi triumfalis, yang membuat kita seringkali kehilangan solidaritas dengan korban penderitaan yang ada di sekitar. Singgih melihat bahwa Tuhan mengidentikkan diri-Nya dengan mereka yang menderita, dimana Matius 25:31-46 menurut Singgih mengajak untuk membalikkan pemahaman teologis, dalam rangka berpihak pada korban-korban ketidakadilan

struktural dan bencana alam.²⁷ Dalam konteks penolakan rencana tambang LTJ, terlihat jelas bahwa solidaritas masyarakat Salutambun karena panggilan Gereja untuk menolak rencana tambang LTJ, menampilkan spiritualitas yang tak hanya terkurung dalam gedung gereja. Solidaritas ini tercipta karena masyarakat Salutambun adalah komunitas yang taat pada intruksi gereja, serta BPMJ jemaat Elim Salutambun yang juga mampu merespon ancaman kehadiran rencana tambang LTJ. Ketaatan jemaat dan respons BPMJ ini pada akhirnya melahirkan gerakan penolakan.

Kedua, *Eklesiologi*. Menurut Singgih eklesiologi hendaknya memperlihatkan identitas sebagai umat Tuhan yang melayani dunia dan juga menampilkan keterbukaan dalam menjawab tuntutan kelima konteks. Seperti dalam perjamuan makan yang diadakan-Nya, Yesus mengajarkan tentang persekutuan yang inklusif, kekudusan berjalan bersama dengan bela rasa.²⁸ Aspek eklesiologi dalam penolakan rencana tambang LTJ terlihat pada keberanian masyarakat Salutambun yang menampakkan identitasnya sebagai warga kerajaan Allah yang hendak mengubah ketidakadilan struktural. Selain itu, masyarakat Salutambun dengan identitasnya yang terbuka melakukan kerjasama dengan sejumlah elemen gerakan mahasiswa, menunjukkan bahwa komunitas ini merupakan persekutuan yang inklusif.

Ketiga, *Misiologi*. Sebagaimana eklesiologi yang terbuka, maka hal ini akan menghasilkan misi yang terbuka pula. Teologi publik melihat Tuhan berada di dalam maupun di luar, di dunia ini. Itulah yang membuat persekutuan gereja yang eksklusif dan kaku menjadi terbuka dan menghadapkan wajah kita kepada publik. Menurut Singgih teologi publik melihat Tuhan berada di dalam dan di luar gereja, di dunia ini. Maka umat beribadah supaya dengan demikian mendapat kekuatan berjuang bersama Tuhan di luar gereja.²⁹ Aspek Misiologi dalam penolakan rencana tambang LTJ, dinampakkan melalui praktik kongkrit Gereja Jemaat Elim Salutambun seperti gedung gereja yang ditempati untuk melakukan rapat. Bahkan dalam beberapa ibadah, majelis gereja mengupayakan akomodasi bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi penolakan rencana tambang LTJ.

C. Teologi Publik secara Horisontal (Tiga Poros Kekuasaan)

²⁷ Singgih, *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik: Sebuah Kumpulan Tulisan Teologi Kontekstual Emanuel Gerrit Singgih*, 379–80.

²⁸ Singgih, 381.

²⁹ Singgih, 382.

Dalam bagian ini, penulis akan menggunakan alat analisis tiga poros kekuasaan atau kerangka *Civil Society* untuk memetakan posisi pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan rencana tambang LTJ. Singgih menyebut bahwa *civil society* berhubungan dengan istilah “*civilized*” atau “*civilization*”, suatu masyarakat yang beradab yang didasarkan atas keadilan, kebebasan/demokrasi, dan toleransi. Singgih sedikit mengkritik diskusi *civil society* di Indonesia, yang sering dikaitkan dengan “masyarakat madani” dan hanya berlandaskan pada hukum. Ia menyebut bahwa; bukannya hukum tidak penting, namun seringkali hukum dipelintir alat oleh negara untuk memenuhi kepentingan sendiri. Itulah sebabnya Singgih mendasarkan *civil society* dengan keadilan, demokrasi, dan toleransi.³⁰

Singgih melanjutkan dengan menyebut bahwa ranah publik dipengaruhi oleh tiga poros kekuasaan, yaitu: negara (berhubungan dengan politik), pasar (berkaitan dengan ekonomi), dan komunitas (berkaitan dengan budaya dan agama). Menurut Singgih ketiga poros ini haruslah berada dalam posisi yang seimbang, dimana keterhubungan antara satu poros dengan yang lainnya disimbolisasikan dalam bentuk segitiga sama sisi, yang mencerminkan pola relasi yang interdependen (ketiganya saling membutuhkan namun tidak saling mendominasi atau meniadakan). Menurut Singgih keseimbangan antara ketiga poros dalam konteks perjalanan sistem di Indonesia, beberapa kali mengalami gangguan. Misalnya pada masa Orde Baru, negara mencoba untuk mengkooptasi pasar dan komunitas. Sedangkan pada masa kini (reformasi), ketiga poros tersebut justru berusaha menguasai satu sama lain (pasar cenderung mengatur negara dan komunitas, begitu pula dengan keterhubungan pilar-pilar lainnya yang saling berlomba untuk menonjolkan dominasinya). Hal ini berakibat pada berbagai persoalan yang muncul, seperti: ekonomi masih carut marut, bahkan komunitas kehilangan sensibilitas sosialnya dan mudah mengambil langkah-langkah kekerasan. Sebagai refleksinya, Singgih melihat pengembalian keseimbangan pada ketiga poros tersebut amat diperlukan sehingga kontinuitas keberadaan *civil society* dapat bergerak secara wajar.³¹

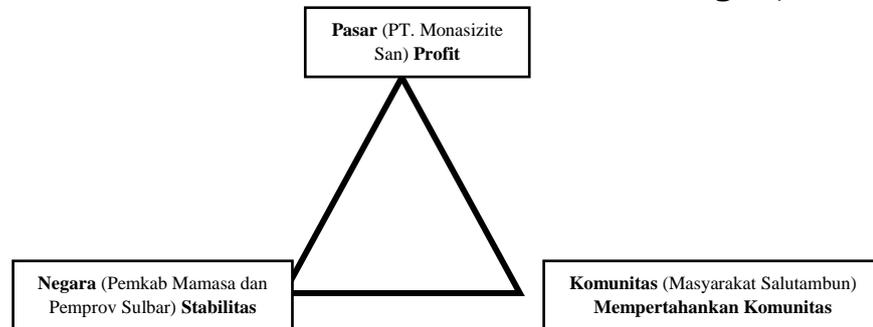
Jika dilihat pada kasus penolakan rencana tambang LTJ oleh masyarakat Salutambun, maka penulis melihat pemetaan tiga poros kekuasaan sebagai berikut: Poros Negara adalah pemerintah Kabupaten Mamasa dan pemerintah Provinsi Sula-

³⁰ Singgih, *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik: Sebuah Kumpulan Tulisan Teologi Kontekstual Emanuel Gerrit Singgih*, 375.

³¹ Singgih, 375–76.

wesi Barat, Poros Pasar adalah PT. Monasizite San, dan Poros Komunitas adalah Masyarakat Salutambun itu sendiri.

Gambar 3 Ranah Publik Penolakan Rencana Tambang LTJ



Dalam uraian pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa pasar tidak melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan, bahkan tidak meminta izin sebelum memasukkan wilayah komunitas kedalam titik koordinat IUP. Hal ini kemudian membuat sensibilitas sosial komunitas terganggu, hingga komunitas melakukan penolakan terhadap rencana tambang LTJ. Serangkaian peristiwa ini menandakan bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam tiga pilar *civil society*, dimana pasar dan komunitas berusaha menguasai satu sama lain. Pasar cenderung mengatur negara dan komunitas, begitu pula dengan komunitas yang ingin menonjolkan dominasinya melalui negosiasi dengan negara. Dengan kondisi yang rumit ini, maka penulis merasa penting untuk memperlihatkan kepentingan dan posisi ketiga poros kekuasaan ini, sebelum mengupayakan keseimbangan antara ketiganya. Sesuai dengan uraian Singgih, bahwa ketiga poros memiliki keterkaitan dengan aspeknya masing-masing, maka penulis melihat bahwa Pasar berada di posisi Global dengan kepentingan Profit, Negara berada di posisi Nasional dengan kepentingan menjaga Stabilitas Sosial, dan Komunitas berada di posisi Lokal dengan kepentingan Mempertahankan Komunitas. Memahami kepentingan ketiga poros ini akan bermanfaat dalam merumuskan keseimbangan antara ketiganya.

IV. Penutup

Secara keseluruhan teologi publik yang dibangun dalam penolakan rencana tambang LTJ oleh masyarakat Salutambun telah memperlihatkan sikap kritis dan tidak anti struktur. Muatan ini selaras dengan teologi publik yang dirumuskan oleh Gerrith Singgih baik secara vertikal maupun secara horisontal. Namun sebagai evaluasi bagi jemaat Elim Salutambun, penulis melihat diperlukan kajian ekologi sebagai alasan penolakan rencana tambang LTJ yang lebih melibatkan kehadiran Allah di dalamnya. Evaluasi ini, penulis dasarkan pada gagasan Singgih yang menambahkan komponen Allah/*God* dari segi tiga analisis bioregionalisme dan transaksionalisme untuk mencapai (*global ethics*) yang di cetuskan oleh Richard Evanoff. Menurut Singgih alasannya karena yang dicari bukan hanya etika Ekologi, tetapi etika Teologi. Kehadiran Allah dipahami, bahwa Ia bukanlah semata-mata transenden, tetapi imanen sehingga Dia hadir di dalam semua ciptaan (alam), yang berarti panenteis, sehingga ketiga komponen dalam analisis Evanoff ditambahkan dengan komponen (**G**), yakni God (Yang Ilahi) menjadi God Nature (**GN**), God Society (**GS**), dan God People (**GP**).³² Sesuai dengan temuan pada penolakan rencana tambang LTJ oleh masyarakat Salutambun, maka diuraikan evaluasi sekaligus dapat menjadi refleksi teologis, sebagai berikut:

1. Jika **G** berada di dalam **N**, maka masyarakat Salutambun perlu melihat penolakan rencana tambang LTJ karena mereka setara dengan alam dan sama-sama menjadi ciptaan Allah.
2. Jika **G** berada di dalam **S**, maka masyarakat Salutambun mengajak kerjasama Pemerintah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, PT. Monazite San, bahkan seluruh masyarakat yang pro terhadap rencana tambang LTJ untuk memelihara lingkungan karena ada peran Tuhan di dalamnya.
3. Jika **G** berada di dalam **P**, maka terjadi transformasi pemahaman masyarakat Salutambun terkait gambaran hubungan relasi dengan Allah, Manusia dengan Alam yang setara, tanpa mengorbankan salah satunya.

Daftar Pustaka

³² Emanuel Gerrit Singgih, *Pengantar Teologi Ekologi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), 230–31.

BPS Kabupaten Mamasa, Badan Pusat Statistik. 'Kecamatan Buntu Malangka' Dalam Angka 2023', 2023.

Media, Kompas Cyber. 'Mengenal Logam Tanah Jarang atau Rare Earth yang Bikin Geger se-Eropa Halaman all'. KOMPAS.com, 14 January 2023.

<https://money.kompas.com/read/2023/01/14/112117826/mengenal-logam-tanah-jarang-atau-rare-earth-yang-bikin-geger-se-eropa>.

O, Arie. 'Laporan Survey Tinjau Lokasi Mika Derah Kecamatan Mambi Bumal Dan Aralle, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat'. Jakarta: PT. Monazite San, 2015.

Pena Sulbar. 'Tegas Tolak Tambang Masuk P.U.S, Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mamasa Sambangi DPMPTSP Sulbar', 22 September 2020. <https://penasulbar.co.id/tegas-tolak-tambang-masuk-p-u-s-alian-s-mahasiswa-kabupaten-mamasa-sambangi-dpmptsp-sulbar/>.

'Rencana Penambangan LTJ Di Mamasa Mulai Tuai Penolakan - Halaman 2 - Tribun-Timur.Com'. Accessed 1 December 2023. https://makassar.tribunnews.com/2020/08/16/rencana-penambangan-ltj-di-mamasa-mulai-tuai-penolakan?page=2#google_vignette.

'Respons Aspirasi Pemuda, Bupati Mamasa Sepakat Tolak Tambang Logam Tanah Jarang | Kumparan.Com'. Accessed 1 December 2023. <https://kumparan.com/sulbarkini/respons-aspirasi-pemuda-bupati-mamasa-sepakat-tolak-tambang-logam-tanah-jarang-1u58UDEfmse>.

Saputra, Jefri Andri. 'Analisis Makna Simbol Batu Tallu Dan Täbä Tallu Tentang Pemeliharaan Allah Di Salutambun Dengan Menggunakan Teori Ernst Cassirer'. *KAMASEAN: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 1, no. 1 (2020): 55–70.

Singgih, Emanuel Gerrit. *Dari Ruang Privat Ke Ruang Publik: Sebuah Kumpulan Tulisan Teologi Kontekstual Emanuel Gerrit Singgih*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.

———. 'Membangun Teologi Publik Mengenai Topik "Profitability, Solidarity, Sustainability" Di Bawah Payung Ketidakadilan, Akan Terbit Dalam Antologi EGS, Dari Reformasi Ke Pasca Reformasi.' Yogyakarta, 2024.

———. *Pengantar Teologi Ekologi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.

'Tadi Siang Di Kantor DPRD Provinsi Sulbar... - Riskul Nursan Tona | Facebook'. Accessed 1 December 2023.

<https://www.facebook.com/100010836673751/posts/pfbid021cs8uYueoTnrzwizkAihjt58YM9uP18CLaFMs2rwYNjJmWUQ4gXDFXBFThawZS8l/?app=fbl>.

Tribun-timur.com. 'Lagi, Pemuda dan Mahasiswa di Mamasa Demo Tolak Tambang LTJ'. Accessed 1 December 2023. <https://makassar.tribunnews.com/2020/09/24/lagi-pemuda-dan-mahasiswa-di-mamasa-demo-tolak-tambang-ltj>.

'Warta Kominfosandi Mamasa - Postingan | Facebook'. Accessed 2 December 2023.

<https://www.facebook.com/108568330731387/posts/pfbid0bgFyys6NRMBFBMrkgJNDKJ5fsdpGaa7mUi3sfzo3Yfe55Fs3Cz2UVsRBUBGF8qzBl/?app=fbl>.

Wawancara dengan Arwias Pemuda Desa Salutambun. Via Whatsapp, 27 November 2023.

Wawancara dengan Mahenrata Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Elim Salutambun. Via Whatsapp, Desember 2023.

Wawancara dengan Ebenheiser, Majelis Gereja Jemaat Elim Salutambun, 2 January 2024.

Wawancara dengan Gani, Pemuda Desa Salutambun. Via Whatsapp, 26 November 2023.

Wawancara dengan Jefri Andri Saputra, Mahasiswa Teologi IAKN Toraja yang berasal dari Salutambun Timur. Via Whatsapp, Desember 2023.

Wawancara dengan Pdt. Arifin, S.Th Pendeta di Jemaat Elim Salutambun (periode 2016-2021). Via Whatsapp, Desember 2023.